



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

buletin

EDISI 20 TAHUN 2020

IN
FO

BINA MARGA

Menyambung Negeri

Langkah Nyata Bina Marga dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Bawah di Tengah Pandemi

**Mempercepat Pelayanan Jalan
Ditjen Bina Marga Terapkan
Skema KPBU pada Kegiatan
Preservasi Jalintim Sumatera**



Tahun ini ada 38
Jembatan Gantung
Dibangun Guna Tingkatkan
Konektivitas Antar Desa



Langkah Cepat
Kementerian PUPR
Tangani Bencana
di Sulsel



1. DOA KESELAMATAN DAN KEBAHAGIAAN BERSAMA



2. IKUTI PROTOKOL KESELAMATAN COVID-19

BINA MARGA SIAGA COVID-19



3. JAGA KONDISI JALAN



4. BANGUN EMPATI DAN MEMBERI

buletin
INFO BINA MARGA
Melayan Masyarakat

Pelindung
 Direktur Jenderal Bina Marga

Pemimpin Umum
 Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga

Dewan Redaksi
 Para Direktur di lingkungan
 Direktorat Jenderal Bina Marga
 dan Sekretaris BPJT

Pemimpin Redaksi
 Kabag Hukum & Komunikasi Publik

Redaktur Pelaksana
 Sub Koordinator Komunikasi Publik

Redaksi
 Angelia A.W
 Girly Kurniati
 Deva Lusya Susanti

Kontributor
 Kabag / Kasubag TU BB/BPJT I-XVII

Fotografer
 Riko Dwiputra
 Hasian LT

Desain / Tata Letak
 Sarotona Zega
 Imam Warmanto

Administrasi
 Wulandari Wurjanti

Tata Usaha
 Martina Piranti



Menyatukan Program dan Kinerja selama Pandemi Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo meminta supaya program yang menyerap tenaga kerja dan mendorong perekonomian di kalangan menengah bawah harus diteruskan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah, Program Padat Karya Tunai (PKT).

Presiden meminta program yang berjalan di desa-desa dikawal dengan ketat. Hal tersebut disampaikan pada saat rapat terbatas tentang ekonomi desa secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2020.

Sadar arti penting Program PKT, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah merealisasikannya sebanyak 58,14 persen sampai 29 Agustus 2020. Untuk nilainya telah mencapai Rp 7,16 triliun. Sementara dari sisi tenaga kerja, program PKT ini sudah menyerap sebanyak 402.449 pekerja, dari target 638.990 tenaga kerja.

Dari semua direktorat yang ada di Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga juga punya tanggung jawab untuk menuntaskan program PKT. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, program PKT sudah ada sebelum pandemi. Dalam situasi sekarang, PKT diperluas. Tidak hanya menyentuh pekerjaan rutin tetapi juga yang non rutin. "Yang sekarang kita jalankan padat karya yang non rutin," katanya beberapa waktu lalu.

Secara umum, program ini merupakan kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Di lain pihak, pandemi tidak boleh menyurutkan kinerja organisasi. Itulah mengapa, Kementerian PUPR melakukan terobosan menyederhanakan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan organisasi, serta melakukan penilaian berbasis kinerja.

Alhasil, jumlah jabatan struktural yang dihilangkan sebanyak 813 jabatan. Terdiri dari 67 jabatan eselon III, 593 jabatan eselon IV di Pusat (Unit Organik), serta 153 jabatan eselon IV di Daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT).

Salah satu wujud dari reformasi birokrasi ini adalah Ditjen Bina Marga berhasil melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penjaminan, dan Regres Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta 3 Agustus 2020.

Preservasi Jalintim di Sumatera Selatan ini merupakan proyek KPBU AP kedua setelah proyek kereta api Makassar – Parepare yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan dan BUMN terkait. Dan menjadi proyek KPBU pertama untuk non-tol berbasis kinerja.

Semoga di tengah pandemi, dengan banyak keterbatasan, kita tetap "Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat" supaya bersama seluruh masyarakat, mampu melewati krisis ini dengan baik.



6

LAPORAN UTAMA

- 5** Langkah Nyata Bina Marga dalam Mengangkat Daya Beli Masyarakat Bawah di Tengah Pandemi
- 8** Mempercepat Pelayanan Jalan, Ditjen Bina Marga Terapkan Skema KPBU pada Kegiatan Preservasi Jalintim Sumatera

LAPORAN KHUSUS

- 10** Langkah Cepat Kementerian PUPR Tangani Bencana di Sulsel



11

- 12** Kemen PUPR Rombak Struktur Organisasi untuk Tingkatkan Profesionalitas dan Kinerja

GALERI BIMA

- 14** Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara
- 16** Jaringan Jalan 5 KSPN Unggulan Non Super Prioritas Tetap Dibangun Tahun Ini
- 18** Tol Desari Seksi II Brigif - Sawangan Resmi Dibuka
- 19** Tahun ini ada 38 Jembatan Gantung Dibangun Guna Tingkatkan Konektivitas Antar Desa



19

- 20** Pasca Pelantikan, Dirjen Bina Marga Pimpin Sertijab Pimpinan Tinggi Pratama



20

- 21** Kartun

TEKNO KONSTRUKSI

- 22** Jembatan Ramah Lingkungan Hasil Litbang PUPR Berdiri di Surakarta



22

KILAS BALAI

- 24** Peningkatan Jalan Pringsurat - Secang - Keprekan Untuk Mendukung KSPN Borobudur
- 25** Kementerian PUPR Prioritaskan Pembangunan Jalan Trans Jayapura - Wamena
- 26** Saat Insan PUPR Tanggap Bencana di Pulau Seram



Langkah Nyata Bina Marga dalam Mengangkat Daya Beli Masyarakat Bawah di Tengah Pandemi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas program Padat Karya Tunai (PKT), sebagai langkah cepat menghadapi pandemi Covid-19. Ini adalah salah satu *refocusing* kegiatan kementerian, termasuk di dalamnya Ditjen Bina Marga.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, program PKT sudah ada sebelum pandemi. Dalam situasi sekarang, PKT diperluas. Tidak hanya menyentuh pekerjaan rutin tetapi juga yang non rutin. "Yang sekarang kita jalankan padat karya yang non rutin," katanya beberapa waktu lalu.

Secara umum, program ini merupakan kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan PKT rutin adalah membersihkan saluran, memotong rumput, pengecatan kerb dan median jalan, pembersihan serta pengecatan

jembatan. "Membersihkan rumput ya tentu menggunakan mesin. Contoh pengecatan jembatan terjadi di Temanggung," terang Hedy.

Sedangkan PKT non rutin terkait dengan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, pembangunan jalan atau jembatan, sampai ke pekerjaan yang terkait operasional jalan tol. Contoh pekerjaannya adalah membuat galian saluran, menggali struktur yang kedalamannya sampai dengan 2 meter, serta memasang batu dengan mortar. "Untuk jenis pekerjaannya kita pilih-pilih, mana yang bisa digantikan dengan manusia. (Yang tidak bisa digantikan) misalnya mencampur beton sulit dengan orang. (Juga) mencampur aspal panas, ya tetap pakai *hot mix*," lanjut Hedy.

Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Pelaksanaan PKT di lingkungan Ditjen Bina Marga terbilang istimewa dibanding praktik sejenis di organisasi lain. Karena program ini telah dialokasikan pada kontrak *longsegment*, yakni penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus (bisa lebih dari satu ruas). Tujuannya, kondisi jalan yang selalu mantap sehingga berdampak positif bagi kegiatan masyarakat.

Bisa dikatakan, PKT bukan sesuatu yang dibuat tetapi dimasukkan pada kegiatan yang memang sudah ada. Di tengah pandemi, PKT semakin ditingkatkan supaya semakin banyak orang terlibat di dalamnya. Artinya, semakin menyerap tenaga kerja, baik mereka yang selama ini menganggur, setengah menganggur, atau kondisi ekonomi lemah sehingga membutuhkan tambahan pemasukan.

Selain dari itu, pelaksanaan PKT diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah ingin uang pembangunan didistribusikan ke desa-desa. Terkait pembayaran upah tenaga kerjanya dibayarkan langsung kepada pekerja, secara tunai setiap minggunya.

Kementerian PUPR menargetkan program PKT akan bisa menyerap 605.898 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, 30.252 orang diharapkan terlibat di PKT bidang Bina Marga. Untuk selebihnya, tersebar di direktorat lain. "Kita juga memahami bahwa banyak sekali pekerja migran kembali. Jadi kita usahakan agar mereka mendapatkan penghasilan. Jadi [pelaksanaan

PKT] memang bukan pemerataan tapi disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing," papar Hedy.

Ketika PKT dijalankan, Ditjen Bina Marga tidak jalan sendirian. Para PPK yang bertanggung jawab di suatu ruas jalan melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat, yang dalam hal ini di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Koordinasi harus dilakukan supaya target tercapai dan mendapat banyak tenaga kerja yang memang membutuhkan pekerjaan.

Selain itu, Hedy menambahkan, mereka juga berkoordinasi dengan para anggota DPR. "Yang tahu persis kondisi daerahnya [kan para anggota DPR]. Sehingga anggota DPR bisa langsung lihat [dan] memberikan masukan pada kita."

Sejauh ini, program PKT dapat berjalan dengan baik. Hambatannya terkait dengan pandemi Covid-19 yang membuat pergerakan menjadi terbatas. Namun demikian, Ditjen Bina Marga telah mengeluarkan peraturan supaya PKT dilaksanakan dalam koridor protokol kesehatan yakni tetap menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan menghindari kerumunan.

Sekalipun pandemi, kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas. Pelaksanaan PKT di masa pandemi maupun sebelum pandemi harus punya kualitas sama, sebagaimana telah ditetapkan. Terlebih, PKT punya seorang pengawas dalam setiap kelompok.

Foto: Dok. Ditjen Bina Marga



Kegiatan Refocusing Lain

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Ditjen Bina Marga telah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp.17.353.545.000.000 ditambah dukungan fasilitas kesehatan di Pulau Galang sebesar Rp.200.000.000.000. Jadi totalnya Rp.17.553.545.000.000, sudah termasuk di dalamnya membeli karet petani untuk campuran aspal karet, membeli resin dari Perhutani untuk campuran cat marka jalan.

Khusus untuk pelaksanaan program PKT anggaran yang disediakan sebesar Rp. 840 miliar. Selain itu Ditjen Bina Marga juga memberi perhatian kepada para petani yang pasti juga terdampak pandemi. Untuk itu, melalui kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, diputuskanlah untuk membeli karet dari para petani.

Pemanfaatan karet/ bokar untuk campuran aspal tidak serta merta dilakukan sekarang. Jauh sebelum pandemi, Kementerian PUPR telah beberapa kali melakukan ujicoba pengaspalan dengan campuran karet di berbagai tempat. Hasilnya memuaskan. Saat ini, kegiatan ini diperluas lagi.

Kenapa karet? Karena Indonesia merupakan penghasil karet terbesar ke-2 di dunia. Produksi karet kita mencapai 3,1 juta ton (data 2015) dengan potensi diserap oleh pasar domestik sebesar 10-15%. Di lingkungan Bina Marga, karet dimanfaatkan untuk campuran aspal karet, *rubber bearing*, *rubber strip*, trotoar, *kerb*, dan masih banyak lainnya.

Khusus di tahun 2020, Ditjen Bina Marga telah mengalokasikan pemanfaatan karet/ bokar senilai Rp. 100 miliar untuk 6.990 ton bokar. Status terakhir, telah terealisasi sebanyak 812,07 ton bokar. Nilai sebesar ini diharapkan dapat mendongkrak daya beli petani karet kita di masa pandemi.

Terakhir adalah pemanfaatan *rosin ester* dari hasil produksi dalam negeri. *Rosin ester* yang menjadi bahan baku alami cat marka jalan berasal dari olahan getah pohon pinus. Cat yang beredar di pasaran, bahan baku utamanya yakni resin (C5) berasal dari turunan minyak bumi. Resin ini 88% diimpor, sehingga beban biayanya di atas 50% dibanding bahan-bahan lainnya.

Untuk itulah, kita coba beralih menggunakan resin ester yang berasal dari getah pohon pinus. Bahan alami ini memiliki daya rekat yang sangat baik dan lebih tahan cuaca dibandingkan dengan Resin C5. Apalagi, Indonesia merupakan produsen olahan getah pinus terbesar ke-3 di dunia.



Setidaknya, ada 2 produsen *rosin ester* untuk marka jalan di Indonesia yang berlokasi di Trenggalek dan Gresik. Sedangkan distributornya berlokasi di Jakarta Timur, Cikarang, Purwokerto, dan Surabaya.

Pada tahun anggaran 2020, Ditjen Bina Marga telah mengalokasikan pengadaan *rosin ester* senilai Rp. 25 miliar. Dana itu terkait ruas jalan nasional sepanjang 2.424 km dari 13.587 km total jalan nasional yang memerlukan pengerjaan marka jalan. Saat ini masih dalam tahap proses pengadaan barang.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagai mitigasi pandemi Covid-19 tidak main-main dilakukan, karena urusannya soal kelangsung ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Melalui PKT, pembelian karet dan olahan getah pinus Ditjen Bina Marga memilih untuk berpihak kepada mereka yang membutuhkan stimulus daya beli.

Lebih dari itu, apa yang diusahakan oleh Ditjen Bina Marga menunjukkan bahwa kita bangga pada produk dalam negeri. Masa krisis harus menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali pada pelukan ibu pertiwi, yang melahirkan, membesarkan, dan mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke.

Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Mempercepat Pelayanan Jalan, Ditjen Bina Marga Terapkan Skema KPBU pada Kegiatan Preservasi Jalintim Sumatera



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah penting di tengah pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi kita melambat. Diharapkan skema ini tetap mendorong ekonomi masyarakat terus berputar.

KPBU menjadi semakin nyata ketika dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penjaminan, dan Regres Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta 3 Agustus 2020.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang menghadiri acara tersebut, proyek KPBU Jalintim Sumatera Selatan ini merupakan terobosan dan *pilot project* dalam penyelenggaraan jalan non-tol di lingkungan Ditjen Bina Marga yang menggunakan Skema KPBU.

Ia berharap, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan akibat kondisi jalan yang baik. Tentunya hal ini juga berdampak kepada penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, serta berkurangnya polusi udara.

Adalah kewajiban, Basuki menekankan, tetap melakukan pemeliharaan jalan non tol. Sekalipun pemerintah sedang menuntaskan jaringan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung sampai Aceh. Sama halnya memelihara Jalan Pantura, sekalipun nanti Tol Trans Jawa tersambung.

“Walaupun pembangunan Tol trans Sumatera terus kita laksanakan agar tersambung dari Bakauheni sampai Banda Aceh pada 2024, tetapi Jalintim tidak bisa kita kesampingkan perannya sebagai jalur logistik vital. Sama seperti Tol Trans Jawa di mana peran jalan nasional tidak bisa ditinggalkan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, mengatakan bahwa Preservasi Jalintim di Sumatera Selatan ini merupakan proyek KPBU AP kedua setelah proyek kereta api Makassar – Parepare yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan dan BUMN terkait.

Preservasi ini juga merupakan proyek KPBU non-tol berbasis kinerja pertama. Di samping itu, Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumatera Selatan ini merupakan proyek pertama di sektor jalan non-tol yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“KPBU AP adalah proses pembelajaran sebagai upaya mencari alternatif skema pembiayaan. Kegiatan perdana ini diharapkan menjadi perhatian kita semua sehingga ke depannya dapat berjalan dengan lebih baik,” tutur Hedy.

Untuk sampai pada tahap sekarang, Hedy menambahkan, butuh proses yang lama. Dimulai tahun 2017, baru masuk tahap transaksi bulan Juli 2018. Dilanjutkan dengan proses lelang pada Juli 2019, pengumuman pemenang lelang pada 12 Juni 2020 hingga sampai proses saat ini. Selanjutnya, ditargetkan pada Januari 2021 sudah dapat dilaksanakan *Financial Close*.

Skema yang mencakup DBFOMT (*Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer*) ini, setelah tiga tahun masa konstruksi selesai di tahun 2024, dapat dilanjutkan dengan dua belas tahun masa layanan, sehingga aset dapat kembali diserahkan kepada Ditjen Bina Marga pada tahun 2036.

Hedy berharap, ke depannya agar Proyek KPBU-AP Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi *best practice* pelaksanaan KPBU-AP di Kementerian PUPR dan kemudian dapat memancing proyek-proyek infrastruktur lainnya untuk dikembangkan melalui skema KPBU-AP. “Karena ini adalah *pilot project*, harusnya ini kegiatan yang tidak boleh gagal. Kami mohon betul-betul menjadi perhatian kita semua. Ke depan lebih baik lagi, lebih tertib administrasi dan lebih cepat. (Maka saya) minta dikawal khusus Pak Irjen,” harapnya.

Senada dengan Hedy, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pengelolaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bramantio Isdijoso dalam sambutan tertulisnya mendukung Proyek KPBU-AP Jalintim Sumsel ini. Menurutnya, proyek preservasi jalan non tol ini dapat menjadi tulang punggung pengembangan perekonomian regional yang selanjutnya akan mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

“Proyek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruas jalan non tol dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Kami berharap penggunaan skema KPBU dapat terus menjadi alternatif solusi pembiayaan infrastruktur dan mempercepat *delivery* penyediaan layanan infrastruktur bagi masyarakat Indonesia”, jelasnya.

Ia pun sangat berharap, apa yang telah dimulai oleh Kementerian PUPR ini dapat menginspirasi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menjajaki skema-skema pembiayaan kreatif guna mempercepat penyediaan layanan infrastruktur bagi masyarakat Indonesia.

Namun ia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan bukan upacara tanda tangan seperti saat ini. Ukurannya adalah tersedianya layanan jalan yang bagus untuk masyarakat. Proses masih panjang, semangat tidak boleh berkurang. Dukungan dari para *stakeholder* masih sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terkait dalam pembebasan lahan untuk pembangunan dua fasilitas Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Lingkup utama Proyek KPBU ini adalah melaksanakan preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km dan 14 buah jembatan. Ruas jalan yang ditangani meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga kan dilengkapi dua buah UPPKB.

Kegiatan ini memiliki masa konsesi 15 tahun yang terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan dengan estimasi biaya investasi kegiatan adalah sebesar Rp 916,4 miliar. Preservasi dilaksanakan oleh PT Jalintim Adhi-Abipraya.

Foto: Dok. Ditjen
Bina Marga

Langkah Cepat Kementerian PUPR Tangani Bencana di Sulsel

Tengah tahun 2020, Sulawesi Selatan dilanda bencana hebat. Hujan intensitas tinggi dan struktur tanah labil memicu longsor di ruas jalan Palopo – Rantepao, Propinsi Sulawesi Selatan. Tidak lama kemudian, banjir bandang menerjang Masamba, Kabupaten Luwu Utara.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung menerjunkan alat berat untuk membuka akses. Hal ini penting untuk membuka jalur bantuan yang akan datang kemudian. Setelah konektivitas kembali tersambung, Langkah perbaikan baru dilaksanakan.

Bencana longsor yang terjadi pada 26 Juni 2020 membuat ruas jalan Kota Palopo – Rantepao putus di KM 366+500 dan KM 368, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Padahal ini adalah jalur vital pergerakan orang dan logistik yang menghubungkan kota pelabuhan Palopo dan pusat produksi pertanian di kawasan Toraja.

Akibat longsor tersebut sedikitnya 6 rumah warga terbawa longsor. Tidak ada korban jiwa, karena rumah sudah ditinggal penghuninya. Selain itu juga ada 40 kendaraan terjebak di antara longsor.

Sedangkan banjir bandang yang terjadi di tanggal 13 Juli 2020 membuat akses jalan, rumah penduduk sampai Bandara Andi Jemma tertutup lumpur dan batang pohon dengan ukuran beragam.

Selain mengerahkan alat berat, Kementerian PUPR juga mengerahkan Mobil Tangki Air berkapasitas 4.000 liter 1 unit dan Hidran Umum berkapasitas 2000 liter 10 unit untuk membantu kebutuhan air bersih. Lalu ada karung sebanyak 1000 lembar serta sembako untuk para pengungsi korban bencana banjir.

Akibat limpasan air bah, sedikitnya sampai 19 Juli 2020 ada 38 orang meninggal dunia, 46 orang hilang, dan 58 orang luka-luka. Secara umum, kedua bencana ini diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Di hari bencana, curah hujan di kedua tempat memang sangat tinggi. Di sisi lain, aktifitas manusia mengakibatkan alih fungsi hutan dan lahan untuk pertanian dan pertambangan.

Perbaikan Akses Palopo - Rantepao

Kementerian PUPR berhasil membuka akses pasca banjir bandang yang berimbas sampai enam kecamatan, yakni, Sabbang, Baebunda, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat, dan yang terparah adalah Kecamatan Masamba. Setelah itu, penanganan terfokus pada menyambungkan kembali konektivitas jalur Palopo-Rantepao.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya mengatakan pihaknya akan melakukan penanganan sementara dan permanen di ruas yang bagian dari Trans Sulawesi tersebut. Untuk penanganan darurat akan dibuat jembatan gantung untuk orang dan kendaraan roda dua.

Prioritas yang dilakukan adalah pembangunan jembatan gantung karena jumlah warga yang terisolasi dari Kota Palopo mencapai 250 jiwa dan 18 KK yang bermukim di sekitar lokasi longsor.

Terkait hal ini, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan Kementerian PUPR Muh. Insal U. Maha mengonfirmasi bahwa jembatan gantung tersebut sudah selesai dan diresmikan oleh Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bando pada hari Jumat, 25 September 2020.

"Sudah selesai dan sudah bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Jembatan gantung ini diperuntukan untuk masyarakat yang mau ke Toraja maupun sebaliknya," ungkap Insal beberapa waktu lalu.

Spesifikasi jembatan memiliki panjang bentang 84 meter dengan panjang jalan pendekat arah Palopo 140 meter dan arah Rantepao 57 meter, dengan lebar 4,2 meter yang mampu menahan beban hingga 1,5 ton.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga

Thomas Setiabudi Aden mengatakan jembatan ini merupakan wujud komitmen Kementerian PUPR untuk tetap menjaga konektivitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama disaat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Ia berharap, masyarakat setempat bisa menjaga dan merawat jembatan ini. Hal itu juga diungkap oleh Bando, "Kita semua meminta agar masyarakat agar kerja sama dalam menjaga jembatan tersebut. Diharapkan lurah dan camat serta dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat membuat aturan untuk mengatur penggunaan jembatan tersebut," jelasnya.

Hasil kerja Kementerian PUPR ini juga mendapat apresiasi dari Mahfud (32), salah satu warga sekitar. Pedagang ikan asal Kota Palopo itu mengaku sangat terbantu dengan selesainya jembatan tersebut sehingga bisa mendistribusikan barang dagangannya dengan lancar. "Alhamdulillah, kami tidak lagi kesulitan jika hendak berjualan ikan ke Toraja Utara," katanya.

Ke depan, Insal menambahkan, pihaknya akan membangun jembatan permanen yang dapat dilalui mobil dan kendaraan lainnya.

Jembatan permanen dengan rangka baja permanen atau *re-alinyemen trase* jalan itu akan menghubungkan jalan lama yang terputus oleh longsor. Saat ini ada 2 alternatif desain jembatan yang sedang diajukan.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Kemen PUPR Rombak Struktur Organisasi untuk Tingkatkan Profesionalitas dan Kinerja



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk di dalamnya Ditjen Bina Marga, menyederhanakan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan organisasi, serta melakukan penilaian berbasis kinerja.

“Kementerian PUPR memulai reformasi birokrasi dan perampingan organisasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat pelantikan di depan sidang MPR/DPR. Salah satunya dengan menetapkan dan melantik pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional,” kata Menteri Basuki Hadimuljono saat melantik 1772 orang Pejabat Fungsional Madya dan Muda sebagai hasil dari Penyetaraan Jabatan Administrasi (eselon III dan IV) di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Menurut Basuki, jumlah jabatan struktural yang dihilangkan sebanyak 813 jabatan. Terdiri dari 67 jabatan eselon III, 593 jabatan eselon IV di Pusat (Unit Organik), serta 153 jabatan eselon IV di Daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT).

Perampingan jabatan struktural tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan melibatkan para profesional atau pejabat

fungsional pada bidangnya masing-masing.

“Kita menuju ke arah spesialisasi melalui keahlian jabatan fungsional dimana semua kinerja pegawai dinilai setiap saat,” tutur Basuki.

Ilustrasinya, ia menambahkan, pada saat membangun sebuah bendungan yang dibutuhkan adalah jabatan fungsional yang ahli di bidang Sumber Daya Air. Satu bendungan dibutuhkan ahli hidrologi, ahli geologi teknik, ahli pengairan, dan ahli lainnya.

Untuk itu perombakan ini juga diikuti dengan reformasi di bidang Pendidikan SDM-nya. Politeknik PU tengah menyiapkan program spesialis strata dua (S2) dengan materi keahlian khusus. “Akan dibuka pendaftaran untuk super spesialis. Bukan hanya Magister Teknik, tetapi super spesialis yang dididik selama 18 bulan dimana 1 semester dilakukan di kelas dan 2 semester di lapangan, untuk menjadi ahli di

eksplorasi air tanah, ahli di jembatan khusus, ahli terowongan, ahli irigasi,” jelas Basuki.

Ke depan, diharapkan SDM PUPR menjadi pilar pembangunan yang mengedepankan profesionalitas dalam bidangnya. SDM kita harus punya spesialisasi. Kalau seseorang disebut ahli jembatan maka yang bersangkutan harus betul-betul memahami seluk beluk jembatan, *expert* di bidang jembatan.



Perubahan Struktur di Ditjen Bina Marga

Perubahan susunan struktur organisasi juga dilakukan di Ditjen Bina Marga. Dalam satu kesempatan, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan bahwa organisasinya menetapkan 3 unit eselon II pusat yang semula 6 menjadi 9 unit eselon II. Mengurangi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang semula 8 menjadi 7 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Membentuk 16 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang semula 10 menjadi 26 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan membentuk 4 Balai Teknik.

Kemudian, Pejabat Pengawas Pusat yang semula terdapat 78 menjadi 8 pejabat pengawas. Lalu Pejabat Pengawas UPT (BBPJJN / BPJJN) yang semula terdapat 133 menjadi 108 pejabat pengawas. Selain itu, penyederhanaan birokrasi juga dilakukan dengan mengalihkan jabatan administrator dan pengawas menjadi jabatan-jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi sesuai dengan kriteria penyetaraan

jabatan, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai koordinator maupun sub koordinator.

Artinya, para pejabat pengawas tidak lagi menempatkan pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis, sehingga ke depannya jabatan kepala sub bagian tata usaha, kepala sub bagian umum, dan tata usaha akan dijabat oleh para pegawai dengan latar belakang pendidikan non teknis.

Perubahan struktur organisasi ini, Hedy menekankan, selain dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan karena rentang kendali yang luas, juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap risiko penyimpangan yang terjadi.

Secara umum, Hedy menekankan bahwa insan PUPR khususnya Bina Marga harus punya keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif serta inovatif. Khusus untuk para pengawas di Ditjen Bina Marga harus menyelaraskan kegiatan prioritas yang menjadi perhatian dari pimpinan, karena menjadi bagian hierarki dari organisasi.

Sebagai informasi, ada 511 Jabatan Fungsional Ahli Madya dan 1.261 Jabatan Fungsional Ahli Muda yang dilantik oleh Menteri Basuki Hadimuljono. Sedangkan Hedy Rahadian, pada kesempatan terpisah, melantik 116 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Ditjen Bina Marga. Kedua upacara tersebut diwakili beberapa peserta sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sedangkan peserta lainnya mengikuti pelantikan secara virtual.

Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Penyederhaan organisasi tersebut dilakukan melalui penetapan struktur organisasi Kementerian PUPR yang baru berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR serta Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR.

Adapun, penyetaraan Jabatan Administrasi (eselon III dan IV) ke dalam Jabatan Fungsional diatur dalam PermenPANRB Nomor 28 tahun 2019, dan untuk Kementerian PUPR telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Surat Nomor B/309/M.SM.02.00/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Kementerian PUPR.

Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini sangat penting sebagai upaya meningkatkan perekonomian secara merata sampai ke pelosok.

Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan penanganan Covid-19 tetap berjalan, namun demikian pembangunan infrastruktur tidak boleh dilupakan. Untuk itulah, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga secara bertahap membangun jalan perbatasan yang memiliki panjang 966,59 km.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, jalan perbatasan punya banyak nilai strategis. Harus jadi prioritas. "Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan



mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa, 28 Juli 2020.

Terkait teknik pengerjaan, Basuki melanjutkan, pengaspalan akan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk. Juga yang terdapat fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan.

Sebagai informasi, pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp 231 miliar untuk pembangunan 8 ruas jalan perbatasan dan tiga ruas akses perbatasan di wilayah Kaltara.

Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara sepanjang 966,59 km terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 km dan akses perbatasan 352,04 km. Hingga akhir 2019, dari total panjang tersisa 80,8 km belum terbuka.

Seperti diketahui, pembangunan jalan perbatasan yang telah konstruksi adalah Jalan Long Semamu Long Bawan 3 sepanjang 1,2 km dengan progres 0,38%, Jalan Long Semamu Long Bawan 4 sepanjang 1,8 km progres fisik 1,6% dan biaya Rp 20,9 miliar.

Kemudian, Jalan Long Boh Metulang Long Nawang sepanjang 3,5 km progresnya 37,12%, dan Jalan Long Boh Metulang Long Nawang 2 sepanjang 2,5 km dengan progres 33,7%.

Sementara untuk 4 ruas sisanya masih dalam tahap persiapan lelang yakni Jalan Malinau Semamu 1 sepanjang 1,4 km, Jalan Long Semamu Long Bawan sepanjang 2 km, Jalan Long Semamu Long Bawan 2 sepanjang 2,1 km, dan Jalan Long Nawang sepanjang 400 meter.

Selain jalan perbatasan, anggaran juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan 3 ruas akses perbatasan di wilayah Kaltara. Seperti Ruas Jalan Malinau - Long Semamu - Long Bawan - Long Midang (Indonesia) - Lawas (Sarawak, Malaysia) sepanjang 8,5 km dari total panjang 198,71 km.

Kemudian, ruas Jalan Malinau - Mensalong - Tau Lumbis - Keningau (Sabah, Malaysia) sepanjang 221,73 km, dan Ruas Jalan Malinau - Langap - Long Kemat - Long Nawang (Indonesia) - Sibul (Sarawak, Malaysia) sepanjang 6,4 km dari total panjang 443,43 km.

Foto: Dok. Ditjen
Bina Marga

Jaringan Jalan 5 KSPN Unggulan Non Super Prioritas Tetap Dibangun Tahun Ini

Jaringan jalan di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Unggulan namun di luar kategori super prioritas tetap dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Ini bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam meningkatkan pariwisata nasional.



Lima daerah wisata tersebut adalah di Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur). Sedangkan KSPN Super Prioritas adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado – Likupang.

Dukungan yang diberikan oleh Kementerian PUPR khususnya Ditjen Bina Marga adalah meningkatkan konektivitas menuju 5 KSPN unggulan tersebut. Untuk itu, pada tahun 2020 Ditjen Bina Marga mengalokasikan anggaran Rp 402,56 miliar untuk meningkatkan jaringan jalan dan jembatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, penataan trotoar dan *drainase*, pembangunan jalan baru, dan perbaikan jembatan.

Tujuan utama dari pembangunan ini adalah wisatawan menjadi lebih mudah untuk mengakses tempat wisata tersebut. Semakin

akses terbuka, semakin banyak wisatawan datang baik domestik maupun manca negara. Artinya, pergerakan ekonomi masyarakat lokal dan nasional dapat berputar kencang serta membuka lapangan pekerjaan. "Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Alokasi anggaran untuk KSPN Morotai sebesar Rp 195,98 miliar yang digunakan untuk menangani 8 paket pekerjaan infrastruktur. KSPN Tanjung Kelayang dianggarkan sebesar Rp 15,32 miliar untuk 11 paket pekerjaan. Lalu peningkatan akses KSPN Tanjung Lesung tahun ini dianggarkan Rp 111,46 miliar untuk mengerjakan 8 paket pekerjaan.

Selanjutnya ada KSPN Wakatobi mendapat Rp 2,48 miliar untuk 2 paket pekerjaan. Dan terakhir ada Rp 154,8 miliar untuk meningkatkan jaringan jalan di KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

Foto: Dok. Ditjen
Bina Marga

10 (SEPULUH) PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL + 1 (SATU) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL



Tol Desari Seksi II Brigif - Sawangan Resmi Dibuka

Tol Depok - Antasari (Desari) Seksi II Brigif – Sawangan resmi dibuka untuk umum mulai Jumat, 3 Juli 2020. Dengan demikian, ruas baru ini semakin meningkatkan konektivitas kawasan strategis perkotaan metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

“Jalan tol ini sejajar dengan Tol Jagorawi, sehingga nanti kalau jalan tol ini tersambung sampai di Bogor, maka sekitar sepertiga arus lalu lintas di Jagorawi akan pindah ke sini terutama bagi pengendara yang melintasi Kebayoran - Pasar Minggu menuju Bogor,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya yang diterima Minggu, 5 Juli 2020.

Foto: Dok. Ditjen
Bina Marga

Ke depan, Jalan Tol Desari rencananya akan terus dilanjutkan pembangunannya sampai Salabenda, Kabupaten Bogor sepanjang 6,5 km. Juga akan terkoneksi dengan Tol Bogor *Outer Ring Road* (BORR).

Tol Desari Seksi II memiliki panjang 6,3 km dengan empat gerbang yakni Gerbang Krukut 1 (keluar tol), Gerbang Krukut 4 (masuk tol),

Gerbang Sawangan 1 (keluar tol) dan Gerbang Sawangan 4 (masuk tol). Seksi 2 ini berakhir di jalan nasional Jalan Raya Sawangan, Jawa Barat.

Tol Desari memiliki total keseluruhan panjang 21,60 Km dan terbagi dalam 3 seksi, yaitu Seksi I Antasari - Brigif sepanjang 5,80 km, Seksi II Brigif - Sawangan sepanjang 6,30 km, Seksi III Sawangan - Bojong Gede sepanjang 9,50 km yang ditargetkan beroperasi pada Januari 2021.

Perusahaan yang terlibat dalam pembangunan adalah PT Citra Waspphotowa yang merupakan anak perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) dengan saham mayoritas dimiliki PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar 62,50%, PT Waskita Toll Road sebesar 25% dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebesar 12,50%.



Tahun ini ada 38 Jembatan Gantung Dibangun Guna Tingkatkan Konektivitas Antar Desa

Pandemi Covid-19 menyerang semua daerah, tak terkecuali daerah perdesaan. Maka pembangunan di desa tidak boleh berhenti. Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menjalankan program pembangunan 38 jembatan gantung untuk aksesibilitas penduduk desa.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Tahun 2020 ini, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 179,4 miliar untuk membangun sebanyak 38 unit jembatan gantung yang tersebar di 16 Provinsi di Indonesia. Dari total 38 jembatan gantung tersebut, 1 unit sudah terkontrak sedangkan 34 unit lainnya masih dalam proses lelang.

Pembangunan ini melengkapi pembangunan 300 jembatan gantung pada periode sebelumnya. "Hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Menurut Basuki, jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan. Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan.

Jembatan gantung yang punya panjang antara 42 m - 300 m tersebut, akan dibangun di Provinsi Aceh 3 unit, Provinsi Sumatera Utara 6 unit, Provinsi

Sumatera Barat 3 unit, Provinsi Jambi 3 unit, Provinsi Kepulauan Babel 1 unit, Provinsi Banten 3 unit, Provinsi Jawa Tengah 2 unit, Provinsi Jawa Timur 3 unit, Provinsi Kalimantan Tengah 1 unit, Provinsi Kalimantan Selatan 1 unit, Provinsi Kalimantan Utara 2 unit, Provinsi Sulawesi Selatan 3 unit, Provinsi Papua 6 unit, Provinsi Kalimantan Barat 2 unit, Provinsi Lampung 1 unit, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Unit.



Pasca Pelantikan, Dirjen Bina Marga Pimpin Sertijab Pimpinan Tinggi Pratama



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Pejabat di lingkungan Ditjen Bina Marga diminta untuk memperhatikan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat di sekitar pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian memimpin pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) 17 Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga pada Rabu, 3 Juni 2020 di Gedung Bina Marga, Kementerian PUPR Jakarta.

Menurut Hedy, semua orang di lingkungan Ditjen Bina Marga tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan aparatur sipil negara dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian di lingkungan kerja.

Selain itu, program kerja padat karya harus terus dijalankan. Hal ini penting mengingat sektor ketenagakerjaan sedang dihantam pandemi Covid-19. Ada banyak kasus pemutusan hubungan kerja, sehingga ada banyak orang memerlukan pekerjaan baru.

Berkaitan dengan itu, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilakukan Ditjen Bina Marga diminta melibatkan pemberdayaan masyarakat guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dibayarkan secara tunai mingguan yang dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.

Para pejabat yang dilantik terdiri dari 10 pejabat struktural eselon II.A dan delapan pejabat struktural eselon II.B. Pejabat yang dilantik yaitu Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc sebagai Sekretaris Ditjen Bina Marga, Ir. Miftachul Munir, M.T sebagai Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc.,Ph.D sebagai Direktur Pembangunan Jalan.

Juga ada Ir. Yudha Handita Pandjiriawan, M.T.,M.B.A. sebagai Direktur Pembangunan Jembatan, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc sebagai Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng sebagai Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II dan Ir. Budi Harimawan Semihardjo, M.Eng.Sc sebagai Direktur Jalan Bebas Hambatan.

Kemudian Ir. Deded Permadi Sjamsudin, M.Eng.,Sc. sebagai Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ir. Subaiha Kipli, M.T. sebagai Direktur Kepatuhan Intern serta Dr. Triono Junoasmono, S.T.,M.T. sebagai Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.

Sementara untuk lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), dilantik Ir. Selamat Rasidi,

M.Sc sebagai Kepala BBPJN Sumatera Utara, Ir. H. KGS. Saiful Anwar, M.T. sebagai Kepala BBPJN Sumatera Selatan, Dr. Ir. Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc sebagai Kepala BBPJN Jakarta-Jawa Barat dan Ir. Satrio Sugeng Prayitno, M.M. sebagai Kepala BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta.

Selanjutnya Ir. Achmad Subki, M.T. sebagai Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali, Ir. Muhammad Insal U. Maha, M.Sc sebagai Kepala BBPJN Sulawesi Selatan serta Ir. Junaidi, M.T. sebagai Kepala BBPJN Kalimantan Timur.

Pada saat Sertijab, Dirjen Bina Marga juga mengucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdian kepada para pejabat yang telah dan akan memasuki Purnabakti serta yang ditugaskan di luar Ditjen Bina Marga yaitu, Ir. Soebagiono M.Sc (Eng), Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc, Ir. Atyanto Busono, M.T., Ir. Achmad Herry Marzuki, CES serta Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.

Sebelum melakukan Sertijab, pagi hari di hari yang sama, para pejabat tersebut telah dilantik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono di Gedung Auditorium Kementerian PUPR Jakarta.



PROGRAM PADAT KARYA INFRASTRUKTUR YANG DIRENCANAKAN BERJALAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2020 AKAN MENYERAP 638 RIBU TENAGA KERJA DI SELURUH INDONESIA. PENYERAPAN TENAGA KERJA DIHARAPKAN DAPAT MENGERAKKAN EKONOMI MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI.
- MENTERI PUPR BASUKI HADIMULJONO -

Jembatan Ramah Lingkungan Hasil Litbang PUPR Berdiri di Surakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan produk inovasi bernama *Eco JPO* atau jembatan penyeberangan orang ramah lingkungan. Jembatan yang berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi, Solo dioperasikan kali pertama saat diresmikan pada Jumat, 10 Mei 2019.





Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Deded P Sjamsudin mengatakan *Eco JPO* mengusung konsep berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. "Konsep keberlanjutan dari ketiga aspek tersebut terlihat dari desain yang menarik dengan memperhatikan kearifan lokal, fasilitas yang memperhatikan isu gender, serta penyediaan fasilitas untuk interaksi sosial," kata Deded P Sjamsudin saat peresmian *Eco JPO*.

Jembatan mengakomodir ruang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berjualan. Maka aspek ekonomi menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari sisi sosial, *Eco JPO* yang sudah diinisiasi sejak tahun 2017, menjadi sarana interaksi sosial dan menjawab kebutuhan kaum difabel.

Yang terpenting sehingga disebut *Eco JPO* karena energi yang diperlukan untuk mengoperasikan *JPO* berasal dari sinar matahari. Selain itu, jembatan juga memanfaatkan air hujan yang disimpan pada *ground water tank* untuk menyiram tanaman.

Nilai tambah lainnya adalah menerapkan perangkat keamanan di area bentang utama dan area tangga serta lift. "Selain itu juga artistik dengan penggunaan ornamen-ornamen wayang, ukiran batik dan aksesoris bangunan arsitektural yang mengusung budaya lokal," ujar Deded.

Pemerintah Kota menyambut baik *Eco JPO* hasil Litbang Jembatan ini. Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo bahkan menamai *Eco JPO* ini

"Gladhag Panti Husada" yang berarti tempat atau jembatan ngudi kesehatan, disamping itu tempat menuju keselamatan di mana Gladhag sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti jembatan yang ada pagarnya.

Secara teknis, *Eco JPO Gladhag Panti Husada* memiliki total panjang bentang 29 meter dengan bentang utama 18 meter, lebar 10 meter serta *clearance* 5,1 meter. Konstruksi *JPO* menggunakan fondasi *bored pile* berdiameter 40 centimeter dan kedalaman sekitar 7 meter. Dengan hadirnya *Eco JPO* ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lebih aman dan nyaman menyeberang khususnya yang menuju rumah sakit dan halte.

Foto: Istimewa



Peningkatan Jalan Pringsurat - Secang - Keprekan Untuk Mendukung KSPN Borobudur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meneruskan pemeliharaan akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Jawa Tengah. Koordinasi pun dilakukan untuk rekayasa lalu lintas sebagai dampak pekerjaan.



Menurut Koordinator Pengawas Lapangan PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah, Teguh Budi Harsono, wilayah yang dikerjakan adalah masuk dalam kontrak paket *longsegment* Preservasi Jalan Pringsurat - Secang - Keprekan berjalan tanggal 17 April 2020. Jenis pekerjaannya meliputi *patching* (penambalan lubang), pengendalian rumput, pembersihan saluran.

Foto: Dok. PUPR

"Kegiatan ini untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Ruas efektif dari Simpang Artos Magelang sampai Simpang Tiga Keprekan akan dilanjutkan sampai selesai" kata Teguh saat ditemui di lapangan, Jumat, 12 Juni 2020.

Kemacetan tidak bisa dihindari karena pekerjaan ini diawali dengan penggalian aspal menggunakan *Cold Milling Machine* (CMM) di Jalan Mayjend Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang, Jateng. Setelah itu jalan dilapis ulang dengan aspal binder dan aspal *modified*.

Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di depan Artos Mall, Teguh melanjutkan, maka kendaraan dari arah Yogyakarta diarahkan untuk belok kiri. Kemudian untuk mereka yang

datang dari arah Purworejo belok kiri, dan yang akan menuju Yogyakarta akan memutar balik di *u-turn* Soekarno - Hatta. Sedangkan arus dari Semarang menuju Yogyakarta dapat melintas dengan penyempitan jalur.

Pengaspalan ulang dari Artos Magelang sampai Simpang Tiga Keprekan, akan diiringi dengan penyesuaian ketinggian median. Untuk itu pada beberapa lokasi peningkatan jalan tersebut dilakukan pembongkaran kanstin median/ kerb.

"Kita naikkan sesuai dengan ketinggian yang ada kurang lebih 10 - 15 cm," ujar Teguh.

Keseluruhan lingkup pekerjaan yang masuk dalam kontrak *longsegment* tersebut terdiri dari pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 7,09 km, pekerjaan rutin kondisi sepanjang 7 km, pekerjaan penunjang sepanjang 14,32 km, pekerjaan rehabilitasi mayor jalan sepanjang 8,5 km dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 154,7 m.

"Di samping itu di lokasi-lokasi lain yang bahu jalannya rusak kita perbaiki dengan material *cold milling*" pungkas Teguh. (LU/CK/BPPJN)

Kementerian PUPR Prioritaskan Pembangunan Jalan Trans Jayapura - Wamena

Trans Papua hampir selesai. Saat ini salah satu prioritas pembangunan adalah ruas jalan Jayapura-Wamena sepanjang 580 kilometer.

“Pembangunan jalan trans ini harus kita dukung sama-sama, karena merupakan program pemerintah yang harus diprioritaskan. Sehingga dengan akses jalan yang sudah sampai ke Elelim, dapat meringankan beban masyarakat yang ada di 9 kabupaten pegunungan tengah Papua,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, Edu Sasarari kepada wartawan, Minggu, 13 September 2020.

Hal itu dikatakannya setelah melihat dari dekat progress pembangunan Jalan Trans Jayapura-Wamena, Jumat 11 September 2020. Salah satu pekerjaan yang menghambat selesainya ruas ini adalah belum selesainya pengerjaan Jembatan Yahuli, yang juga dikunjungi oleh Edu.

“Pekerjaan Jembatan Yahuli yang berada di Kabupaten Yalimo yang sudah 5 kali putus. Jembatan ini berada di Jalan Trans Jayapura-Wamena yang menghubungkan 9 kabupaten di pegunungan Papua,” katanya.

Sejak Jembatan Yahuli putus, angkutan barang kembali dilakukan melalui udara yang harganya jauh lebih mahal bila dibanding diangkut melalui jalur darat. Untuk itu, ia berharap semua pihak yang terlibat harus bersinergi demi tersambungannya ruas ini.

Karena ketika Jayapura-Wamena selesai, akses transportasi terbuka untuk delapan kabupaten di pegunungan tengah yakni Yalimo, Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Nduga, Yahukimo, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang.

“Meskipun ada kendala, namun kami pastikan bahwa jembatan penghubung seperti jembatan Yahuli sudah dapat difungsikan agar semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Edu.

Jalan Trans-Papua mencakup delapan segmen. Segmen I meliputi Kwatisore-Nabire sepanjang 208,10 kilometer, Segmen II terbentang sepanjang 275,50 kilometer meliputi Nabire-Wagete-Enarotali.

Kemudian Segmen III dari Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena sepanjang 469,48 kilometer, Segmen IV Wamena-Eleum-

Jayapura sepanjang 447,22 kilometer, dan Segmen V Wamena-Habema-Kenyam-Mumugi 271,60 kilometer.

Selanjutnya Segmen VI Kenyam-Dekai 217,90 kilometer, Segmen VII sepanjang 231,60 kilometer dari Dekai menuju Oksibil, dan Segmen VIII Wagete-Timika sepanjang 224 kilometer.

Pembangunan Jalan Trans Papua juga bekerja sama dengan Zeni TNI Angkatan Darat pada saat pembukaan hutan dan pembentukan badan jalan. Selanjutnya pada saat konstruksi, akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR.



Saat Insan PUPR

Tanggap Bencana di Pulau Seram

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penanganan pascabencana banjir di sejumlah wilayah di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Setidaknya bencana tersebut membuat rusaknya jembatan, badan jalan tergerus sampai gorong-gorong yang jebol tak mampu menahan debit air.



Foto: Dok. PUPR

“Curah hujan yg ekstrim terjadi, mengakibatkan terjadi bencana seperti banjir dan luapan sungai di beberapa lokasi,” menurut laporan PPK 1.3 Satker PJN Wilayah I, BPJN XVI Maluku.

Langkah-langkah penanganan telah dan sedang berlangsung. Apalagi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengatakan agar seluruh Balai Kementerian PUPR di daerah-daerah selalu siap siaga terhadap bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. “Terlebih saat Pandemi Covid-19, kondisi jalan dan jembatan harus terus kita jaga agar jalur logistik tidak terputus,” katanya pada satu kesempatan.

Hujan deras yang melanda Pulau Seram dalam rentang waktu 6-20 Juni 2020 mengakibatkan Jembatan Wai Kaka rusak. Jembatan darurat jenis bailey yang terletak di Desa Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat itu terputus dihantam banjir sehingga arus transportasi pada ruas jalan Trans Papua Pulau Seram ini terhenti.

Saat ini penanganan sementara telah dilakukan dengan pemasangan rambu-rambu peringatan, penimbunan kembali abutmen arah Kairatu untuk akses sementara pengguna jalan. Langkah berikutnya adalah menambah bentang jembatan darurat rangka bailey 3 x 30 m² dan menaikkan posisi lantai jembatan agar aman terhadap muka air banjir.

Menurut Kepala BPJN XVI Maluku Jon Damanik, pembangunan Jembatan Wai Kaka diperkirakan selesai pada tahun 2020 ini. “Jembatan dibangun dengan struktur rangka baja karena butuh pelaksanaan cepat, di samping itu lalu lintas di daerah tersebut tidak terlalu ramai sehingga masih memungkinkan menggunakan struktur rangka.”

Pekerjaan jembatan ini merupakan paket preservasi ruas jalan Piru-Kairatu-Waiselan-Liang di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jembatan Wai Kaka merupakan Trans Seram yang merupakan salah satu akses darat penting menghubungkan tiga kabupaten di Pulau Seram, yakni Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Meluapnya Sungai Wai Kaka tidak hanya merusak jembatan, tetapi juga menggerus badan jalan pada ruas Latu-Liang Sta 14+500 sepanjang 85 meter dari arah Latu. Untuk sementara, badan jalan diproteksi dengan geobag di depan turap batang kelapa yang sudah dipancang sebelumnya. Sedangkan rencana penanganan permanen, perbaikan bahu jalan akan menggunakan turap (*Sheet Pile Beton*).

Hujan lebat juga merusak gorong-gorong karena tidak mampu menahan limpahan air dari Sungai Wai Leey. Akibatnya, gorong-gorong berdimensi 2 x 1.5 meter itu tidak bisa berfungsi lagi. Untuk sementara, telah dipasang jembatan darurat rangka bailey 1 x 30 m² dari Jembatan Wai Mariputi di ruas Sp. Waipia – Saleman.

Penanganan permanen akan dibuat *box culver* dengan dimensi yang diperhitungkan cukup untuk menyalurkan debit air pada saat banjir di lokasi tersebut. Juga dipasang bronjong pada daerah hulu serta *sheet pile* untuk penanganan daerah gerusan sungai dekat badan jalan.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

mengucapkan

Selamat Bertugas Kepada Seluruh Pejabat yang telah dilantik

- Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc** sebagai Sekretaris Ditjen Bina Marga
Ir. Miftachul Munir, M.T sebagai Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc.,Ph.D sebagai Direktur Pembangunan Jalan
Ir. Yudha Handita Pandjiriawan, M.T.,M.B.A. sebagai Direktur Pembangunan Jembatan
Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc sebagai Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng sebagai Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
Ir. Budi Harimawan Semihardjo, M.Eng.Sc sebagai Direktur Jalan Bebas Hambatan
Ir. Deded Permadi Sjamsudin, M.Eng.,Sc. sebagai Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan
Ir. Subaiha Kipli, M.T. sebagai Direktur Kepatuhan Intern
Dr. Triono Junoasmono, S.T.,M.T. sebagai Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.
Ir. Selamat Rasidi, M.Sc sebagai Kepala BBPJN Sumatera Utara
Ir. H. KGS. Saiful Anwar, M.T. sebagai Kepala BBPJN Sumatera Selatan
Dr. Ir. Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc sebagai Kepala BBPJN Jakarta-Jawa Barat
Ir. Satrio Sugeng Prayitno, M.M. sebagai Kepala BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta
Ir. Achmad Subki, M.T. sebagai Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali
Ir. Muhammad Insal U. Maha, M.Sc sebagai Kepala BBPJN Sulawesi Selatan
Ir. Junaidi, M.T. sebagai Kepala BBPJN Kalimantan Timur



INDONESIA
MAJU

MENUJU TATANAN
MASYARAKAT BARU
YANG AMAN & PRODUKTIF



DIRGAHAYU
INDONESIA

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

